

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Aos Kuswandi¹
Adlin Resa Purwatih²
Siti Nuraini³

Email: aos_kuswandi@yahoo.com

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui destinasi pariwisata. Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, dan konsep destinasi wisata, merupakan konsep teori yang dipergunakan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder. Penelitian ini mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan pariwisata. Hasil analisis menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai tujuan pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor utama keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mencapai taraf hidup yang baik dengan tersedianya lapangan kerja, dan terciptanya kemitraan antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat (good governance). Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang tinggi.

¹ Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

² Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

³ Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unisma Bekasi

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, Destinasi Wisata, Kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan pariwisata yang menjadi tujuan destinasi wisata unggulan perlu dilestarikan sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Perencanaan dan pengembangan yang efektif diperlukan dengan penataan kebijakan yang jelas dan teruji. Kebijakan dikatakan efektif apabila mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat lokal, lingkungan fisik dan sosial budaya, pananaman modal baik domestik maupun internasional dan wisatawan itu sendiri (Conlin dan Baum dalam Wirawan, 2009).

Perkembangan pariwisata dunia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya penerimaan devisa tanpa kecuali Indonesia. Salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu dengan cara meningkatkan penerimaan devisa, di mana salah satu sektor potensialnya adalah pariwisata (Muljadi, 2012). Sebagai sektor pembangunan yang multidimensional, pembangunan pariwisata nusantara yang mempunyai potensi dampak pengganda (*multiplier effect*) yang relatif besar, sebagai pendorong pembangunan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara termasuk perkembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram terdiri atas dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa yang dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km², terdiri atas daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%). Secara administratif, NTB terbagi menjadi 8 Kabupaten, 2 Kota, 116 kecamatan, 142 kelurahan, dan 995 desa. Berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores sebelah Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Barat dengan Selat

Lombok/Provinsi Bali, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape/Provinsi Nusa Tenggara Timur. (BPS Nusa Tenggara Barat).⁴

Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di dua lempeng besar yakni lempeng Hindia Australia dan Eurasia yang saling berinteraksi dan berbentuk, menjadikan wilayah Nusa Tenggara Barat kaya dengan sumber daya mineral dan energi. Kekayaan alam melimpah dan menyimpan keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi sumber daya hutan, lahan persawahan dan perkebunan, pertambangan, peternakan, kelautan dan pariwisata. Dengan kekayaan yang melimpah, Nusa Tenggara Barat semestinya bisa menjadi suatu wilayah yang lebih baik.

Keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara geografis sangat strategis karena letaknya berdekatan dengan Pulau Bali yang telah berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Bali juga menjadi barometer dan etalase Indonesia dalam industri kepariwisataan. Selain itu, Bali juga merupakan pintu masuk wisatawan dunia datang ke Indonesia. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Barat yang dalam sepuluh tahun terakhir (sejak tahun 2008) melakukan pembenahan dan semakin percaya diri sebagai salah satu destinasi wisata yang mulai dilirik keberadaannya.

Kawasan pariwisata yang menjadi destinasi unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar mampu menciptakan *good governance*. dalam tata kelola pemerintahan. Terdapatnya kawasan-kawasan pariwisata yang mampu menjadi *icon* destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota yang ada di dalamnya. Dengan demikian untuk menciptakan keberhasilan daerah maka pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk saling bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan daerah, mensejahterakan rakyat di Provinsi tersebut.

Letak Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat strategis diapit oleh Nusa Tenggara Timur dengan Taman Wisata Nasional Pulau Komodo dan

⁴ (Sumber: Badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat, 2017 diakses pada Tanggal 9 Desember 2017 Pukul 20.03 WIB)

Bali yang merupakan daerah tujuan wisata Internasional di sebelah Barat serta Tanah Toraja dengan budayanya yang sangat unik berada di sebelah utara. Potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dieksplorasi sejak tahun 1980-an. Daya tarik wisata tidak hanya terdapat di Pulau Lombok dengan potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangannya tetapi juga ada di Pulau Sumbawa yaitu potensi wisata Pulau Moyo yang telah dikenal sejak tahun 1990-an dengan fasilitas wisata yang sangat privasi.⁵Keberadaan pulau Moyo di dunia pariwisata sudah tidak asing lagi sebab pulau tersebut telah banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. Pengembangan kawasan pariwisata di Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pemberdayagunaan semua potensi yang dimiliki oleh daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025.⁶

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mencapai keberhasilan dalam bidang pariwisata sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Keberhasilan tersebut dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain agar mampu mengembangkan potensi daerah. Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh peran pemerintah daerah tersebut dalam mengelola kawasan pariwisata. Kebijakan yang tegas mampu dijadikan acuan oleh pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pengembangan *icon* pariwisata yang unik maka Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencapai keberhasilan yang sangat baik dan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Tulisan ini ingin menjelaskan mengenai pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Barat. Lebih jauh akan dijelaskan keterkaitannya dengan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan kepariwisataan. . Oleh karena itu yang menjadi penting dijelaskan dalam tulisan ini terkait dengan pertanyaan kawasan

⁵ (Sumber: <http://erepo.unud.ac.id/9021/2/5c09d3d27280fd4fcc289e9b21a039d3.pdf> diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.19 WIB).

⁶ Sumber: <http://erepo.unud.ac.id/9021/2/5c09d3d27280fd4fcc289e9b21a039d3.pdf> diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.19 WIB).

pariwisata apa saja yang mampu menjadi *icon* destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat? Apa saja yang menjadi faktor-faktor keberhasilan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pengembangan Kawasan Pariwisata unggulan? Dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata?

Menurut Gamal (2002) menjelaskan bahwa Pariwisata dapat didefinisikan sebagai bentuk suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Koen Meyers (2009), Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

Selanjutnya menurut Sinaga (2010), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata.

Berdasarkan teori-teori para ahli di atas maka dapat di simpulkan dan dianalisis bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang bahkan lebih dalam rangka menuju ke suatu tempat yang diinginkan dan dianggap menarik untuk mendapatkan kesenangan tersendiri yang didukung adanya fasilitas atau pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

Pengertian Destinasi Wisata

Menurut Gunn & Var (2002) menyatakan bahwa destinasi pariwisata merupakan tempat atau lokasi yang selain memiliki daya tarik yang dapat dilihat oleh wisatawan, juga tersedia berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di tempat tersebut, sehingga wisatawan terpikat untuk berkunjung.

Selanjutnya Menurut *European Communities* (2003) menjelaskan pengertian destinasi pariwisata sebagai berikut:

“Destinasi pariwisata dikatakan memiliki tiga unsur penting, yakni tempat atau lokasi khusus, manajemen dan organisasi. Definisi selengkapannya adalah destinasi pariwisata merupakan suatu wilayah yang secara khusus ditetapkan dan dipromosikan sebagai tempat berkunjung bagi wisatawan, dan di dalamnya seluruh produk pariwisata dikoordinasikan oleh satu organisasi tertentu”.

Menurut Ricardson dan fluker (2004 : 48) menjelaskan bahwa destinasi merupakan suatu tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit). Suatu tempat pasti memiliki batas-batas tertentu, baik secara actual maupun hukum.

Dalam rangka pengembangan 27 destinasi pariwisata di Indonesia, definisi yang lebih operasional dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009 yang menegaskan bahwa:

“.....destinasi pariwisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan”.

Mill & Morrison (2012) menggunakan istilah lain tentang destinasi ini, yakni *Destination Mix*, yaitu sekumpulan elemen yang memiliki ketergantungan satu dengan lainnya dalam menciptakan pengalaman berwisata bagi wisatawan.

Berdasarkan teori-teori diatas, maka dapat disimpulkan dan dianalisis bahwa destinasi wisata merupakan tempat tujuan yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh pengunjung dan dijadikan sebagai tempat favorit untuk berekreasi.

Kesejahteraan Sosial

Menurut Zastrow (2000) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat”.

Menurut Midgley (2005:21) mengonseptualisasikan dalam kategori pencapaian kesejahteraan, yaitu: pertama, sejauh mana masalah sosial dapat diatur. Kedua, sejauhmana kebutuhan dapat dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh. Semuanya dapat dicapai dalam kehidupan yang bersama, baik ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat.

Sedangkan menurut Suharto (2009:1) menjelaskan bahwa pengertian kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta dengan tujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial sehingga adanya lapangan kerja yang

tetap untuk peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat”.

Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik (2007) menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan pengertian kesejahteraan sosial yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan”.

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana masyarakat mampu menjalani kehidupannya dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup yang diperlukan. Masyarakat mendapat jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta memiliki taraf hidup yang layak. Masyarakat mampu mencukupi kehidupannya dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan dasar dalam sebuah karya ilmiah untuk meneliti objek permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Sugiono (2009:29) Berpendapat bahwa pengertian metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi

untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini menggambarkan suatu obyek yang akan di teliti berdasarkan data yang di peroleh. Data tersebut mula-mula di inventaris, kemudian di susun secara sistematis agar data dapat dengan mudah di jelaskan.

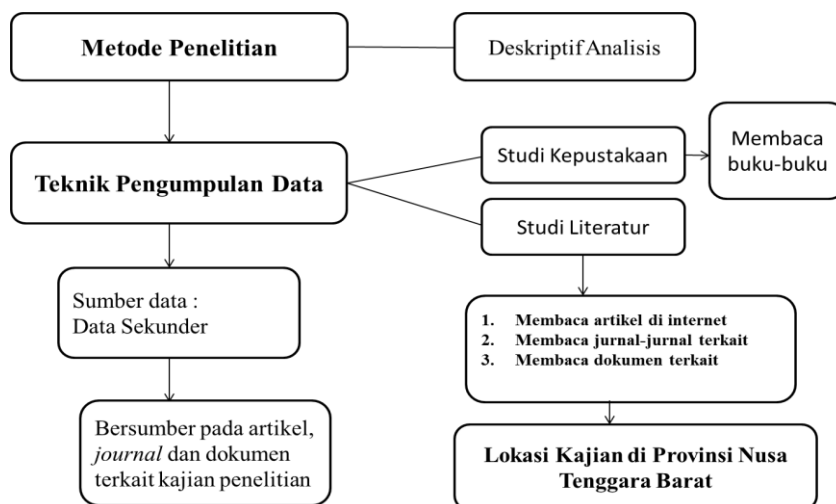
Metode kajian dan penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi, gambaran atau penjelasan mengenai pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun objek kajian yang penulis teliti yaitu pengembangan kawasan pariwisata yang merupakan destinasi wisata unggulan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan kekayaan yang melimpah, maka Nusa Tenggara Barat mampu menjadi wilayah yang lebih baik dengan tingkat kesejahteraan yang baik.

Lokasi kajian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan ibu kota Mataram terdiri atas dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa yang dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km², terdiri atas daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%). Secara administratif Nusa Tenggara Barat terbagi menjadi 8 kabupaten, 2 kota, 116 kecamatan, 142 kelurahan, dan 995 desa. (Sumber: Badan pusat statistik Nusa Tenggara Barat, 2017 diakses pada Tanggal 9 Desember 2017 Pukul 20.03 WIB).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi literatur dengan membaca beberapa artikel, jurnal-jurnal, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian penelitian. Data yang di peroleh bersumber dari data sekunder.

Bagan 1.1. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data



PEMBAHASAN

Kawasan Pariwisata dan Destinasi Wisata Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menempatkan pembangunan kepariwisataan sebagai prioritas kedua setelah sektor pertanian. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 15 kawasan potensial yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata serta mampu melaksanakan peningkatan yang signifikan untuk kemajuan pariwisata, sehingga Nusa Tenggara Barat terpilih sebagai provinsi terbaik pada bidang pariwisata dalam penghargaan *Government Award 2015* yang diselenggarakan oleh *Sindo Weekly Magazine*.⁷ Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur NTB, TGH Zainul Majdi dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata di Nusa Tenggara Barat sudah berkembang dengan baik.

Icon pariwisata yang menjadi daya tarik di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu terletak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok terdapat potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangan, sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat potensi wisata Pulau Moyo. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada sektor pariwisata sangat mendukung untuk

⁷ (Sumber: [Republika.co.id](http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-terpilih-sebagai-provinsi-terbaik-di-bidang-pariwisata.html) dalam <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-terpilih-sebagai-provinsi-terbaik-di-bidang-pariwisata.html> diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.05 WIB).

menghasilkan devisa negara. Terdapat kawasan-kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan yang sangat menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun turis mancanegara. Keberhasilan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengelola kawasan pariwisata sangat baik, dapat di lihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke Daerah Nusa Tenggara Barat baik ke Daerah Pulau Lombok ataupun Sumbawa. (Sumber: Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB Mohammad Faozal, Kamis (4/1) di Mataram, 2017).⁸

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin memantapkan posisinya sebagai destinasi wisata nasional, sekaligus tujuan investasi di bidang kepariwisataan di Indonesia. Pertumbuhan investasi bidang kepariwisataan di Provinsi tetangga Bali ini, meningkat sebesar 22 persen sepanjang tahun 2017. Prosentase Pertumbuhan investasi ini juga meningkat bila dibanding tahun 2016 yang terjadi pertumbuhan sekitar 19 persen. "Pertumbuhan investasi kepariwisataan di NTB tahun ini (2017) mencapai 22 persen. Sektor pariwisata ini menjadi penyumbang tertinggi investasi di wilayah NTB tahun 2017". (Sumber: Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB Mohammad Faozal, Kamis (4/1) di Mataram, 2017).

Menurut Faozal, investasi kepariwisataan di NTB sebagian besar meliputi pembangunan perhotelan, restaurant, pusat rekreasi, serta jasa-jasa dan usaha kepariwisataan lainnya seperti travel agent dan semacamnya. Di sektor pariwisata Provinsi NTB yang terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, memang semakin memesonakan. Panorama alam, keindahan pantai, dan juga kebudayaan beragam di NTB seolah menjadi magnet bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah ini. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan daerah ini menarik lebih dari 3,8 juta wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke daerah ini sepanjang tahun 2017. Jumlah ini juga meningkat bila dibanding tahun 2016 yang jumlah kunjungan total wisatawannya mencapai 3,1 Juta. "Tahun 2017 realisasi kunjungan kita sampai 3,8 juta, melebihi target yang 3,5 juta. Sementara tahun 2018 ini kita targetkan bisa menarik kunjungan hingga 4 juta wisatawan, dan kami optimistik ini pun bisa tercapai,"

⁸ (Sumber: Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB Mohammad Faozal, Kamis (4/1) di Mataram dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/04/semakin-menawan-investasi-pariwisata-di-ntb-meningkat-22-persen> di akses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.43 WIB).

menurut Faozal. Sementara untuk minat investasi, sektor pariwisata di NTB juga mulai banyak dilirik. Apalagi, setelah Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Mandalika di Lombok Tengah, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepariwisata yang merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan pariwisata di Indonesia. (Sumber: Menurut Kepala Dinas Pariwisata NTB Mohammad Faozal, Kamis (4/1) di Mataram, 2017).

Semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk berkunjung maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari penghasilan masyarakat yang bertambah, tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat, berkembangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) masyarakat, dan pengangguran semakin berkurang. Seperti salah satunya yaitu pembuatan berbagai kue pariwisata khas Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Ungkapan dari sejumlah warga pesisir itu merupakan contoh kecil dari dampak kemajuan pariwisata di NTB. Sejatinya masyarakat kecil sudah merasakan “kue pariwisata” meski sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Industri kreatif dan toko penjual oleh-oleh atau berbagai souvenir di Pulau Lombok, terutama di Kota Mataram setiap hari ramai dikunjungi wisatawan yang menggunakan bus pariwisata dari Pulau Jawa.⁹

Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik karena masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat mampu mencukupi kehidupannya demi melanjutkan kehidupannya.

Faktor-Faktor Keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan

Menurut Asbur Hidayat, 2017 bahwa terdapat lima (5) faktor utama dalam pengembangan kawasan pariwisata unggulan yaitu peran pemerintah daerah yang sangat optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata, adanya kebijakan yang tegas dan konsisten, pemerintah mampu menjalin kemitraan yang baik, pertumbuhan dan pembangunan

⁹ <https://mataram.antaranews.com/berita/35928/berbagai-kue-pariwisata-untuk-kesejahteraan-masyarakat>. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 21.05).

infrastruktur yang sangat pesat, dan sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan pengembangan kawasan pariwisata.

Berdasarkan kelima faktor tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, peran pemerintah daerah yang sangat optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata di Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat. Peran pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan pariwisata di dukung oleh masyarakat dan investor. Tuntutan peranan pemerintah sebagaimana di pelopori oleh Bank Dunia, prinsip-prinsip *good governance* yang merupakan penerapan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan negara dan masyarakat sipil serta industri dalam suatu usaha kolektif, merupakan tantangan baru entitas birokrasi pariwisata daerah khususnya Daerah NTB. Dalam hal ini meskipun birokrasi merupakan aktor penting dalam pembangunan pariwisata, perannya tidak boleh dominan. Kewenangan yang dijalankan oleh birokrasi harus dirumuskan melalui konsensus bersama *stakeholders* lainnya. Kolektifitas yang terdiri dari berbagai aktor yang terlibat bukan saja dalam membentuk tetap mengontrol dan mematuhi kewenangan yang dirumuskan. Dalam konteks tersebut pemerintah daerah dituntut selain untuk menguasai substansi dan seluk beluk pariwisata, tetapi juga mampu menjamin proses yang mengakomodasikan kepentingan *stakeholders*. Dengan kalimat lain pemerintah daerah diharuskan oleh peran barunya untuk tidak hanya merumuskan kebijakan strategis dan operasional, tetapi juga menjadi dirijen yang piawai mengakomodasi dan mensinkronisasi semua kegiatan kepariwisataan. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan kontrol pemerintahan mampu mengatur daerah sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Peran tersebut sangatlah penting, karena apabila pemerintah daerah peduli terhadap daerahnya maka daerah tersebut akan menciptakan pemerintahan yang produktif. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat ini sudah mampu menciptakan destinasi kawasan pariwisata yang unggul dan memiliki daya tarik baik di dalam negeri maupun mancanegara.

Kedua, adanya kebijakan yang tegas dan konsisten agar dilaksanakan oleh semua pihak terkait termasuk *stakeholder* (pemangku kepentingan) untuk menciptakan keberhasilan daerah. Kebijakan yang dibuat bersama-sama dan melibatkan semua pihak akan menciptakan produk kebijakan yang baik. Kebijakan/peraturan yang telah dibuat bersama tanpa adanya

paksaan, maka secara otomatis akan dengan sendirinya ditaati oleh masyarakat, apabila kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana didalamnya juga diatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai alternatif pilihan untuk menambah pemasukan bagi daerah dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. di samping itu memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam melestarikan alam dan warisan budaya serta pengembangan wisata. Selanjutnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian apabila kebijakan-kebijakan tersebut mampu dilaksanakan dengan konsisten oleh semua pihak, maka akan mampu menciptakan jalannya pemerintahan yang baik demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya untuk menciptakan kebijakan yang tegas dan konsisten agar masyarakat dapat sepenuhnya percaya terhadap pemerintahan daerah bahwa tata kelola pemerintahan ke depannya akan semakin baik bila didukung oleh masyarakat.

Ketiga, pemerintah daerah mampu menciptakan kemitraan yang baik dengan pihak swasta dan masyarakat sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemitraan yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menciptakan kerjasama antara pelaku di industri pariwisata, masyarakat lokal, dan pihak swasta (investor). Apabila semua elemen dalam tata kelola pemerintahan mampu bermitra dengan baik maka keberhasilan daerah akan dengan mudah untuk dicapai. Pemerintah sebagai kontrol, sedangkan swasta dan masyarakat mampu mendukung pemerintah maka destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat akan semakin pesat perkembangannya.

Keempat, pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Pembangunan sarana dan sarana yang memadai juga dapat menunjang keberhasilan daerah. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa

bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, dan sarana-sarana yang dibuat pada kawasan pariwisata seperti sarana ibadah, MCK, pembuangan sampah dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Kawasan Pariwisata yang begitu banyak harus di lestarikan dengan benar. Sarana dan prasarana harus mendukung untuk memudahkan dalam pengelolaannya. Saran dan Prasarana yang memadai akan menciptakan rasa aman, nyaman bagi para wisatawan.

Kelima, sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan pengembangan kawasan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Produk pariwisata merupakan jasa-jasa pelayanan yang diperoleh dari berbagai instansi dan usaha pariwisata yang satu dengan yang lainnya saling berpengaruh bila salah satu jasa pelayanan kurang memuaskan maka akan menimbulkan citra negatif terhadap jasa pelayanan lainnya. Pelayan yang bermutu dan memuaskan adalah keserasian Antara harapan atau keinginan dan kenyataan. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan pariwisata tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri tetapi harus didukung oleh semua komponen pariwisata dan masyarakat, dimana adanya saling ketergantungan Antara komponen-komponen tersebut. Oleh sebab itu, dalam meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pariwisata tersebut pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (masyarakat), dan aparatur di sektor pariwisata melalui penyuluhan, bimbingan teknis, atau pelatihan-pelatihan pariwisata seperti :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis bagi para pegawai usaha pariwisata yang berlatar belakang bukan pendidikan kepariwisataan
- b. Penyuluhan sapta pesona kepada masyarakat sadar wisata yang ada di kawasan wisata
- c. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para pramuwisata khususnya kepada pramuwisata yang bertugas pada satu objek tertentu
- d. Mengirim aparatur pariwisata untuk mengikuti diklat di bidang pariwisata untuk meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan.

Dengan demikian maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat di butuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelima faktor tersebut sangat penting untuk mencapai keberhasilan daerah. Peran pemerintah, kebijakan yang tegas dan konsisten, kemitraan yang dilakukan pemerintah daerah, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia apabila dikelola dengan baik maka akan mampu menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Masyarakat sebagai *stakeholder* harus ikut berperan aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan kawasan pariwisata mampu berkembang dengan pesat kedepannya.

Strategi Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Mencapai Keberhasilan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Terdapat lima (5) Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menciptakan kerjasama antara pelaku di industri pariwisata, masyarakat lokal, dan pihak swasta (investor). Adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula. Salah satunya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas berat pemerintah. Apabila tugas pemerintah Daerah tidak di dukung oleh masyarakat maka tidak akan mampu mencapai keberhasilan, dengan demikian khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya agar semua pihak saling mengawasi. Pemerintah sebagai kontrol dan membuat kebijakan, sedangkan swasta dan masyarakat ikut mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah. Dengan demikian akan tercipta keberhasilan daerah yang mampu di contoh oleh daerah-daerah lain.

Kedua, Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan NGO (*Non Government Organization*) ikut berperanan dan

berpartisipasi dalam menjaga, dan mengontrol integritas kekayaan alam dan budaya daerah. Budaya daerah/*culture* sebagai kekayaan daerah harus mampu di lestarikan dan di jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak di *claim* oleh negara/bangsa lain. Maka Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus mampu menunjukkan keberadaan kultur budaya serta destinasi wisata unggulan di dunia Internasional sebagai ajang promosi untuk menarik minat wisatawan. Dengan demikian maka pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat harus mampu mengonrol, menjaga, dan mempertahankan kekayaan negara khususnya destinasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Strategi Ketiga, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak swasta yaitu mengenai pentingnya partisipasi komunitas secara terus menerus. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sangatlah penting untuk memberitahukan kepada masyarakat, dan pihak swasta betapa pentingnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kekayaan alam yang dimiliki, semua ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat yaitu menciptakan kesejahteraan melalui destinasi pariwisata.

Keempat, Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bekerjasama dengan lembaga lainnya, dan pelestarian kawasan pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas. Semua ini harus ditunjang dengan pendidikan dan pembinaan secara berkesinambungan (*sustainable*).

Kelima, Pemerintah membuat program pengembangan kemitraan pariwisata kepada pihak-pihak terkait agar mampu melaksanakan pengembangan kawasan pariwisata. Seperti penjelasan-penjelasan diatas maka semua domain dalam tata kelola pemerintahan harus ikut berperan aktif demi menciptakan keberhasilan daerah salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kelima strategi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Daerah Nusa Tenggara Barat untuk mencapai keberhasilan yaitu diperlukan kerjasama dan dorongan dari semua pihak seperti pihak investor/swasta, dan masyarakat. Keberhasilan tidak akan mampu dicapai tanpa adanya

dukungan dari semua pihak. Pemerintah bersama *stakeholder* ikut berperan aktif dalam pengelolaan kawasan destinasi wisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang harus diperhitungkan yaitu kualitas sumber daya manusia agar mampu berperan aktif dalam pelestarian kawasan pariwisata.

Dengan demikian keberhasilan daerah akan di rasakan terutama oleh masyarakat lokal. Masyarakat dapat dengan mudah mencapai taraf kesejahteraan karena masyarakat mampu berperan serta aktif dalam pengelolaan kawasan pariwisata. Lapangan kerja akan mudah didapat karena adanya relasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Contohnya masyarakat dapat membangun UKM, bekerja sebagai pemandu pariwisata, ataupun pekerjaan lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua (2) *Icon* pariwisata yang menjadi daya tarik di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu terletak di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok terdapat potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangan, sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat potensi wisata Pulau Moyo. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada sektor pariwisata sangat mendukung untuk menghasilkan devisa negara.
2. Beberapa faktor-faktor untuk mencapai keberhasilan di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dapat dilihat dari potensi daerah, Sumber Daya Manusia, kebijakan yang konsisten, dan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling bermitra.
3. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dengan membentuk kerjasama, partisipasi (peran aktif), dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan *good good governance*, khususnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Destinasi pariwisata unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini telah mampu menciptakan keberhasilan

khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wisata unggulannya. Kawasan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadi sorotan publik dan mampu menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah tersebut. Sehingga devisa negara dan kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat hingga Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Meyers, Koen. 2009. *Pengertian Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Midgley, James. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Islam.
- Sinaga, Supriono. 2010. *Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Sumatra Utara: Kertas karya DIII pariwisata.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV ALFABETA.
- Suharto. 2009. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Grafindo.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Jakarta: Andi.

Jurnal:

- Romadhin, Sulthon. [Http://jurnal.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/tmp/jurnal-9-Sulthon-Rohmadin.pdf](http://jurnal.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/tmp/jurnal-9-Sulthon-Rohmadin.pdf). Di akses pada hari minggu tanggal 26 November 2017 pukul 20.07 WIB.
- Situmorang, Chazali Husni. [Http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/kebijakan-pemerintah-kaitannya-dengan-kesejahteraan.html](http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/kebijakan-pemerintah-kaitannya-dengan-kesejahteraan.html). Di akses pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 pukul 21.43 WIB.

Dokumen:

Renstra Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009.

Internet:

[Http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf](http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf). Di akses pada hari senin tanggal 27 November 2017 pukul 07.45 WIB.

[Https://mataram.antaranews.com/berita/35928/berbagai-kue-pariwisata-untuk-kesejahteraan-masyarakat](https://mataram.antaranews.com/berita/35928/berbagai-kue-pariwisata-untuk-kesejahteraan-masyarakat). Diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 21.05.

[Https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/04/semakin-menawan-investasi-pariwisata-di-ntb-meningkat-22-persen](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/01/04/semakin-menawan-investasi-pariwisata-di-ntb-meningkat-22-persen) di akses pada tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.43 WIB.

[Http://erepo.unud.ac.id/9021/2/5c09d3d27280fd4fcc289e9b21a039d3.pdf](http://erepo.unud.ac.id/9021/2/5c09d3d27280fd4fcc289e9b21a039d3.pdf) diakses pada Tanggal 10 Desember 2017 Pukul 20.19 WIB.

[Https://www.bappenas.go.id/files/5213/5227/0290/bab-7---sarpras2010093012323327727_20110128112920_2926_7.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5213/5227/0290/bab-7---sarpras2010093012323327727_20110128112920_2926_7.pdf) diakses pada Tanggal 9 Desember 2017 Pukul 19.25 WIB.